

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DALAM PERSPEKTIF HEXAHELIX ASSESSMENT DI DESA KEPUHKIRIMAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

**Naufalariiq Vadio Samsuddin¹, Sri Roekminiati², Ika Devy Pramudiana³
Sapto Pramono⁴, Aris Sunarya⁵**

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: naufalariqvadios@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan program Desa Tangguh Bencana (destana) ini merupakan salah satu program yang digagas oleh BNPB untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis data: 1) Untuk menyajikan deskripsi dan analisis tentang bagaimana implementasi Destana di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif Hexahelix Assessments 2) Untuk menyajikan deskripsi dan analisis tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan atau kegagalan kebijakan Destana. 3) Untuk menyajikan deskripsi dan analisis tentang bagaimana evaluasi implementasi Destana. Penelitian ini menggunakan indikator implementasi dari Edward III, didalam perspektif Hexahelix Assesement, yang selanjutnya hasil dari implementasi akan di evaluasi menggunakan indikator dari Willim N. Dunn. Penelitian ini menggunakan metode analisis menurut Miles & Huberman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implementasi program Desa Tangguh Bencana di desa Kepuhkiriman masih belum berjalan cukup baik karena komunikasi destana dengan unsur-unsur hexahelix hanya sebatas formalitas, dalam sumberdaya sudah mencukupi karena memiliki 40 relawan, dalam disposisi sudah cukup baik hanya saja belum pernah berkegiatan, dan struktur birokrasi memiliki iotang-orang yang tepat. Dalam segi efektivitas Destana sebagai wujud membangun ketangguhan masyarakat desa merupakan suatu hal yang sangat efektif. Untuk efisiensi pembentukan Destana menjadi tanggungjawab pemerintah membuat kebijakan yang dapat dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat. Dalam kecukupan sendiri masih dianggap belum mencukupi dalam aspek sarana dan prasarana, Secara aspek perataan dengan perekrutan anggota relawan yang dibagi berdasarkan perwakilan RW sudah cukup merata. Lalu pada aspek responsivitas masyarakat dalam menyadari potensi bencana di desa yang kemudian membentuk Destana sudah cukup baik.

Kata Kunci : *Evaluasi, Implementasi, Destana, Hexahelix*

ABSTRACT

The Disaster Resilient Village (destana) program policy is one of the programs initiated by BNPB to increase community capacity in disaster management. The purpose of this research is to describe and analyze the data: 1) To present a description and analysis of how the implementation of Destana in Kepuhkiriman Village, Krian Subdistrict, Sidoarjo Regency in the perspective of Hexahelix Assessments 2) To present a description and analysis of the factors that contribute to the success and/or failure of the Destana policy. 3) To present a description and analysis of how Destana implementation is evaluated. This research uses implementation indicators from Edward III, in the perspective of Hexahelix Assessments, which then the results of the implementation will be evaluated using indicators from Willim N. Dunn. This research uses the analysis method according to Miles & Huberman. This research uses a qualitative approach, data collection techniques based on interviews, documentation and observation. The results showed that the implementation of the Disaster Resilient Village program in Kepuhkiriman village was still not going well enough because Destana's communication with hexahelix elements was only limited to formality, in resources it was sufficient because it had 40 volunteers, in disposition it was good enough, it was just that it had never had activities, and the bureaucratic structure had the right people. In terms of effectiveness, Destana as a form of building the resilience of rural communities is very effective. For the efficiency of Destana formation, it is the responsibility of the government to make policies that can be felt and carried out by the community. In terms of adequacy, it is still considered insufficient in the aspect of facilities and infrastructure, in the aspect of equity with the recruitment of volunteer members who are divided based on RW representatives, it is quite even. Then in the aspect of community responsiveness in realizing the potential for disasters in the village which then formed Destana was good enough.

Keywords: *Evaluation, Implementation, Destana, Hexahelix*

PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana dibagi menjadi 2

yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Kebencanaan yang terjadi di Indonesia antara lain banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, gunung meletus, abrasi. (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007) Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi bencana cukup banyak adalah Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten yang

memiliki variasi bencana. Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa daerah ini rawan bencana. Dalam rentang tahun 2000 sampai tahun 2017, Kabupaten Sidoarjo telah mengalami 17 kali kejadian bencana (Data dan Informasi Bencana Indonesia, BNPB dan data BPBD Kabupaten Sidoarjo). Destana merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), salah satu wilayah atau kecamatan di Sidoarjo yang sudah memiliki Destana adalah kecamatan Waru tepatnya terletak di Desa Kepuhkiriman.

Dengan adanya Destana, diharapkan mampu memberikan penanggulangan bencana yang semakin lebih baik dengan memberdayakan masyarakat yang berada di wilayah desa atau kelurahan, Walaupun begitu, keberadaan Destana belum sepenuhnya mampu diterapkan dengan baik. Dalam fakta yang terjadi di lapangan, pelaksanaan Destana, khususnya di kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih sering ditemui berbagai kendala. Sehingga orientasi pelaksanaannya lebih cenderung ‘administrative heavy’ ketimbang ‘substantive heavy’. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Destana di Desa Kepuhkiriman Kecamatan

Waru Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif Hexahelix Assesment?

- 2) Bagaimana faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan atau kegagalan kebijakan Desa Tangguh Bencan dalam perspektif Hexahelix Assesment?
- 3) Bagaimana evaluasi implementasi Destana di Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

KAJIAN PUSTAKA

1) Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. David Easton (1969) mendefinisikan public policy sebagai “The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only theg overnment can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values.” Maksudnya, kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus

dipertanggungjawabkan. Pengertian

kebijakan publik (Public Policy) kemudian diartikan oleh Theodore Lowi dalam Winarno (2002) yang menjelaskan bahwa masalah publik dapat dibedakan kedalam masalah prosedural yaitu bagaimana

pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melaksanakan tugas.

2) Implementasi Kebijakan

Dalam penerapan kebijakan, salah satu proses yang harus dilakukan adalah proses implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi, sering didefinisikan sebagai suatu proses penerapan kebijakan yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan (policy maker) sehingga terkesan kurang berpengaruh. Namun pada proses inilah menjadi sangat penting karena sebuah kebijakan tidak akan ada artinya jika tidak diimplementasikan dengan baik. Tujuan adanya implementasi adalah untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Implementasi adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, maka eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien (Patton dan Sawicki,1993).

3) Model Implementasi Kebijakan

Beberapa ilmuan yang menyatakan pendapatnya terkait implementasi kebijakan publik, diantaranya:

a. Carl E. Van Horn & Donald S. Van Meter

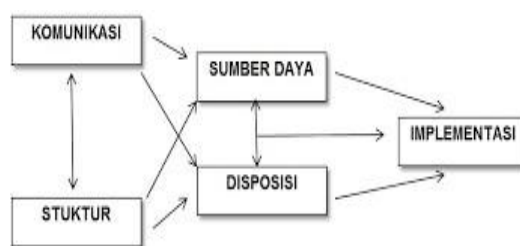
Disebutkan ada enam variabel menurut Van Horn & Van Menter yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: a) ukuran dan Tujuan Kebijakan; b) Sumber Daya; c) Karakteristik Agen Pelaksana/Implementor; d) Disposisi (Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana; e) Komunikasi; f) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

b. Merilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi variabel-variabel sebagai berikut: a) Isi Kebijakan; b) Lingkungan Implementasi.

c. George C. Edward III

Model implementasi dari perspektif Edward III mengutarakan, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling kebergantungan, yaitu: a) Komunikasi; b) Sumber Daya; c) Disposisi; d) Struktur Birokrasi.



Sumber: George C. Edward III (1980)

4) Evaluasi Kebijakan

Mengikuti William N. Dunn (2003: 608-610), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post- tindakan, yaitu lebih pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Menurut Dunn, 2003:608-609, evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya: 1.) Fokus Nilai, 2.) Interdependensi Fakta-Nilai, 3.)

Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau, 4.) Dualitas Nilai.

5) Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn (2003) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

a) Efektifitas (effectiveness).

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

b) Efisiensi (efficiency).

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.

c) Kecukupan (adequacy).

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.

d) Perataan (equity).

Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

e) Responsivitas (responsiveness)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

f) Ketepatan (appropriateness).

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

6) Perspektif Penanggulangan Bencana

Bencana adalah hasil dari munculnya bahaya yang luar biasa pada komunitas yang rentan sehingga tidak mampu mengatasi dari dampak yang terjadi akibat bahaya tersebut, terkait dengan manajemen penanggulangan bencana. Maka UU No. 24 Tahun 2007 menyatakan “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Dalam penetapan sebuah kebijakan manajemen bencana, proses yang pada umumnya terjadi terdiri dari beberapa tahap yaitu: penetapan agenda, pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Untuk penanggulangan bencana sendiri khususnya pada mitigasi bencana mempunyai beberapa konsep sebagai acuan pelaksanaannya, antara lain:

a) Konsep Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Pengurangan risiko bencana adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu

dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan untuk meminimalisir dampak kejadian bencana sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk bertahan serta kembali bangkit dari bencana dalam upaya penghidupan berkelanjutan. Dalam Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015 dengan hasil yang diharapkan dari upaya ini adalah penurunan secara berarti tingkat kehilangan / kerugian baik korban jiwa, aset sosial, ekonomi dan lingkungan dalam masyarakat dan negara yang diakibatkan oleh bencana.

b) Konsep Ketangguhan Syamsul Maarif

Syamsul Maarif (2015) menawarkan konsep ketangguhan yang ‘cukup praktis’ bahwa komunitas bisa dinyatakan ‘tangguh’ dalam menghadapi bencana pada dasarnya merujuk pada dua kata kunci, yakni ‘selamat’ dan ‘bangkit kembali’. Maknanya adalah bahwa ketika seseorang dan atau komunitas berada di wilayah terdampak bencana, maka mereka mampu ‘secara minimal’ merencanakan, mengorganisasi dan menerapkan tahapan penyelamatan paling tidak untuk diri dan atau komunitasnya agar dapat terhindar dari bencana yang terjadi serta mampu bangkit kembali dari keterpurukan akibat bencana baik secara mental / spiritual (dalam domain ilahiyah) maupun dalam domain non-ilahiyah (material). Dan dalam upaya atau tahap penyelamatan tersebut, maka sejumlah aspek ‘kapasitas’ dalam komunitas yang

perlu untuk ditingkatkan adalah : (i) akses informasi; (ii) daya antisipasi; (iii) daya proteksi; (iv) daya adaptasi; dan (v) daya lenting.

7) Konsep Kolaborasi Hexahelix konsep Hexahelix Assessment dimana unsur pemerintah, akademisi, pihak swasta, masyarakat atau komunitas, media, dan masyarakat terdampak bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Salah satu tujuan pendekatan ini adalah dalam rangka upaya penguatan ketahanan dan kapasitas masyarakat untuk menemukan pola kemitraan dalam penanggulangan bencana di suatu kawasan yaitu dengan melibatkan multipihak yang saling bersinergi. Melalui pola kemitraan dimaksud diharapkan dapat mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

8) Gambaran Umum Destana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Pasal 4 Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Dalam Perspektif Hexahelix Assessment Di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Fokus penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian tentang ini bagaimana implementasi Destana di Desa Kepuhkiriman menggunakan model implementasi dari Edward III (1980) (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) dalam perspektif Hexahelix Assessment (pemerintah, akademisi, pihak swasta, masyarakat atau komunitas, media, dan masyarakat terdampak) untuk mengemukakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan atau kegagalan kebijakan Destana dalam perspektif Hexahelix Assesment. Serta evaluasi implementasi Destana di Desa Kepuhkiriman menggunakan Teori dari William N. Dunn (2003) (Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Ketepatan, Responsivitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Program Destana Di Desa Kepuhkiriman
Program Destana yang dilakukan di desa Kepuhkiriman ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan,

kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Untuk itu penelitian tentang Destana kemudian akan dikaji implementasinya menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan beberapa informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Yang selanjutnya akan di telaah menggunakan beberapa teori untuk nantinya akan menemukan sebuah analisa penelitian dengan mengkolaborasikan konsep implementasi kebijakan publik George C. Edward III didalam Perspektif Hexahelix Assessment. Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) dalam perspektif Hexahelix Assessment (Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Media Massa, Akademisi, Masyarakat terdampak) yang akan dijadikan peneliti sebagai acuan dalam mendeskripsikan data lapangan diantaranya:

1. Komunikasi

Dalam variabel komunikasi ini, peneliti melihat bahwa komunikasi yang terjalin antara relawan Destana dengan unsur-unsur yang tergabung dalam Hexahelix Assessment, masih belum berjalan dengan baik. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan belum adanya kegiatan yang terjadi sehingga keberadaan Destana terkesan hanya sebagai formalitas saja. Peneliti beranggapan

bahwa komunikasi yang terjadi seharusnya bisa berjalan jika relawan Destana dan unsur-unsur terkait dapat duduk bersama untuk merumuskan program-program pengurangan risiko bencana.

2. Sumber Daya

Pada variabel sumberdaya, salah satu kelebihan yang ada pada Destana desa Kepuhkiriman adalah terletak pada sumber daya manusia. Jumlah anggota relawan yang berjumlah 40 dianggap sebagai sumber daya yang cukup untuk konteks penanggulangan. Namun, dalam hal sumberdaya yang lain, belum adanya peralatan penunjang pengurangan risiko bencana membuat sumberdaya fasilitas masih dikatakan belum cukup.

3. Disposisi

Karakter pelaksana program Destana di desa Kepuhkiriman sudah cukup baik. Hanya saja hal ini belum dirasakan merata karena di desa ini belum ada kegiatan. Peneliti beranggapan bahwa dengan adanya kegiatan maka dapat diketahui bagaimana karakter dari relawan Destana itu sendiri.

4. Struktur Birokrasi

Struktur kerelawanan Destana desa Kepuhkiriman dirasa cukup baik. Hal ini dikarenakan posisi kepengurusan Destana ditempati oleh tokoh masyarakat setempat dan dibantu oleh relawan yang berasal dari masing-masing RW. Namun hal ini masih belum menjadi dasar sebuah birokrasi dapat berjalan dengan baik dikarenakan kepengurusan Destana belum

menjalankan sebuah program terkait pengurangan risiko bencana.

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Destana Dalam implementasi Destana di Desa Kepuhkiriman, BPBD Sidoarjo menjelaskan komponen kunci atau faktor pendukung utama yang menentukan keberhasilan penerapan program. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya akan ada kendala atau hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Program Destana itu sendiri.

A. Faktor Pendukung

1) Wilayah Desa Kepuhkiriman Memiliki Potensi Bencana lebih dari Satu Jenis Bencana. Wilayah desa Kepuhkiriman yang terletak di kecamatan Waru memiliki lebih dari satu jenis bencana yaitu bencana banjir dan angin puting beliung. Hal ini sangat membutuhkan penanganan bencana yang cepat. Maka dari itu pembentukan Destana di desa Kepuhkiriman ini diperlukan mengingat di desa tersebut memiliki masyarakat yang cukup banyak.

2) Pembentukan Destana Mendapat dukungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kab. Sidoarjo. Pembentukan Destana di Jawa Timur menjadi sebuah instruksi yang termuat dalam peraturan perundangan. Selain itu, pembentukan Destana didasari alasan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki berbagai macam potensi bencana.

3) Masyarakat Desa Kepuhkiriman Memiliki Semangat Penanggulangan Bencana Secara Gotong-Royong. Pada saat sebelum pembentukan Destana, desa Kepuhkiriman pernah mengalami beberapa kejadian bencana seperti bencana puting beliung, dan pohon tumbang. Semangat gotong-royong terlihat pada saat tanggap darurat. Menurut peneliti, sebenarnya masyarakat desa Kepuhkiriman telah memiliki pemahaman mengenai pengurangan risiko bencana. Hanya saja pemahaman tersebut belum diaplikasikan secara tersistem sehingga terkesan belum dilakukan dengan maksimal.

4) Desa Kepuhkiriman sudah membuat FPRB untuk meningkatkan ketangguhan desa. Desa Kepuhkiriman sudah memiliki forum pengurangan risiko bencana. Maka dengan adanya FPRB ini, keberadaan Destana diharapkan akan semakin baik dan memperkuat elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana.

B. Faktor Penghambat

1) Masyarakat Desa Kepuhkiriman Masih Belum Memiliki Mindset Pengurangan Risiko Bencana. Salah satu alasan yang diasumsikan oleh peneliti adalah, berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat desa Kepuhkiriman, warga lebih aktif bergerak ketika saat bencana saja. Artinya, ketika bencana tidak ada, maka tidak ada kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pengurangan risiko

bencana, seperti mengadakan seminar, pelatihan, simulasi/gladi, dsb. Menurut konsep, Pengurangan risiko bencana adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan untuk meminimalisir dampak kejadian bencana sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk bertahan serta kembali bangkit dari bencana dalam upaya penghidupan berkelanjutan. Konsep tersebut yang sampai saat ini belum disadari secara menyeluruh oleh masyarakat.

2) Tidak adanya Bencana pasca Pembentukan Destana. Tidak adanya bencana sejatinya menjadi keberkahan bagi masyarakat. Namun peneliti berpendapat bahwa hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan pelatihan pengurangan risiko bencana. Peneliti beranggapan bahwa masyarakat masih minim literasi tentang bagaimana menanggulangi bencana.

Seharusnya, dengan sudah terbentuknya relawan Destana meskipun tidak ada bencana, maka pelatihan PRB harus tetap diagendakan. Hal ini bertujuan agar edukasi tentang penanggulangan bencana bisa sampai kepada masyarakat.

3) Kurangnya Komunikasi Dan Koordinasi Antara Relawan Dengan Unsur Terkait . Peneliti berpendapat bahwa seharusnya ketika Destana sudah terbentuk, maka relawan yang tergabung di Destana dengan dibantu oleh perangkat desa wajib menjalin

koordinasi dan komunikasi secara intens terkait program- program PRB. Jika dirasa relawan Destana kurang memiliki akses maka hal tersebut bisa disampaikan kepada BPBD Kabupaten Sidoarjo agar bisa jalur komunikasi dan koordinasi bisa terbuka lebih luas.

4) Belum ada kegiatan Destana yang bertujuan untuk penanggulangan bencana. Kegiatan masyarakat yang sudah pernah terlaksana di desa Kepuhkiriman adalah penanaman pohon yang dibantu oleh LPBI NU. Namun kegiatan tersebut dilakukan sebelum ada pembentukan Destana.

5) Desa belum menindaklanjuti Destana kedalam Perdes. Menurut peneliti, dengan tidak adanya peraturan yang mengikat maka keberadaan Destana hanya sekedar formalitas saja. Hal ini menjadi catatan penting mengingat desa Kepuhkiriman memiliki potensi bencana lebih dari satu jenis.

3) Rumusan Rekomendasi Kebijakan Untuk Program Destana Kepuhkiriman

1) Perlu komunikasi lebih intens dengan instansi BPBD Kab. Sidoarjo, Destana desa Kepuhkiriman dan juga BPBD Kabupaten Sidoarjo agar lebih sering menjalin komunikasi dan koordinasi. Perlu diskusi bersama tentang bagaimana rencana program yang sudah atau akan dijalankan bagi keduanya.

2) Perubahan Mindset masyarakat untuk fokus pada Program PRB, unsur-

unsur yang terdapat di dalam kepengurusan Destana desa Kepuhkiriman untuk membuat rencana program mitigasi bencana, serta memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara penganggulangan bencana. Hal ini tidak mudah, namun peneliti berharap agar dengan adanya Destana ini, program-program mitigasi, sosialisasi, dan edukasi dapat tersampaikan kepada masyarakat.

3) BPBD sebagai instansi daerah perlu mendampingi secara intens, BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi penanggulangan bencana yang membawahi kecamatan Waru khususnya desa Kepuhkiriman, agar lebih memfokuskan tentang pembuatan program-program terkait Destana. Hal ini sejatinya akan membantu meringankan tugas BPBD dalam konteks penanggulangan bencana jika masyarakat bisa ter-edukasi dengan baik.

4) Analisa Penelitian Menggunakan Konsep Evaluasi-Implementasi

William N. Dunn (2003) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

1) Efektifitas (effectiveness).

Sejatinya pembentukan Destana sebagai wujud membangun ketangguhan masyarakat desa merupakan suatu hal yang sangat efektif. Hal ini dikarenakan

kegiatan pengurangan risiko bencana mulai dari masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana akan dimulai sejak dini dan bisa dilakukan dari tingkat desa. Namun peneliti merasa bahwa perlu keberlanjutan program Destana ini agar semakin ditingkatkan agar segala aspek bisa bekerja dengan baik.

2) Efisiensi (efficiency).

Pada pembentukan Destana di desa Kepuhkiriman ini, menurut peneliti dirasa sudah efisien. Hal ini mengingat pembentukan Destana menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai bentuk menjalankan sebuah kebijakan yang dapat dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat.

3) Kecukupan (adequacy).

Berkenaan dengan aspek kecukupan ini, ada beberapa yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah keberadaan logistic dan peralatan pengurangan risiko bencana, maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu di bidang penanggulangan bencana. Dalam aspek logistic dan peralatan, penulis merasa bahwa kebutuhan peralatan pengurangan risiko masih dianggap belum mencukupi. Sedangkan aspek sumberdaya manusia secara kuantitas sudah dirasa mencukupi. Hanya saja masih belum diketahui apakah di dalam kuantitas tersebut, terdapat kualitas relawan yang berkompeten dalam kegiatan penanggulangan bencana.

4) Perataan (equity).

Secara aspek perataan, perekrutan anggota relawan yang dibagi berdasarkan perwakilan RW menurut peneliti sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa

desa Kepuhkiriman memiliki rasa kebersamaan dalam menjaga desa salah satunya tentang kegiatan penanggulangan bencana. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan

pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.

5) Responsivitas (responsiveness)
Pada aspek ini, respon yang dilakukan oleh masyarakat desa Kepuhkiriman dalam menyadari potensi bencana di desa yang kemudian membentuk Destana sudah cukup baik dengan melibatkan warga masyarakat desa Kepuhkiriman. Namun respon dalam menindaklanjuti rencana penyusunan program kedepan dirasa sangat lambat. Tidak adanya bencana yang menjadi alasan tidak adanya kegiatan pengurangan risiko bencana sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi masyarakat desa Kepuhkiriman bahwa kegiatan penanggulangan bencana tidak bisa hanya difokuskan pada tanggap

darurat saja. Namun saat ini pergeseran pola pikir yang menekankan pada penanggulangan bencana harus dimulai dari peningkatan kesadaran masyarakat sejak masa pra bencana.

6) Ketepatan (appropriateness).
Pembentukan Destana ini menjadi suatu kewajiban yang wajib dimiliki oleh sebuah desa, terutama di wilayah yang memiliki potensi bencana. Dengan adanya desa tangguh, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat akan adanya bencana menjadi meningkat.

KESIMPULAN

a. Dipandang dari empat variabel Teori Implementasi yang dikemukakan oleh Edward III di Destana Kepuhkiriman dapat disimpulkan dari komunikasi yang terjalin antara relawan Destana dengan unsur-unsur yang tergabung dalam Hexahelix Assessment, masih belum berjalan dengan baik karena hanya sebatas formalitas saja. Untuk di bidang sumber daya destana kepuhkiriman memang unggul dalam jumlah relawan yang cukup banyak yaitu 40 Relawan, namun destana kepuhkiriman belum mempunyai peralatan penunjang pengurangan risiko bencana. Dalam sisi disposisi sendiri karakter pelaksana program Destana di desa Kepuhkiriman sudah cukup baik, hanya saja hal ini belum dirasakan merata karena di desa ini belum ada kegiatan. Pada aspek struktur birokrasi destana kepuh kirimandirasa cukup baik. Hal ini

dikarenakan posisi kepengurusan Destana ditempati oleh tokoh masyarakat setempat dan dibantu oleh relawan yang berasal dari masing-masing RW. Namun hal ini masih belum menjadi dasar sebuah birokrasi dapat berjalan dengan baik dikarenakan kepengurusan Destana belum menjalankan sebuah program terkait pengurangan risiko bencana.

- b. Pada evaluasi implementasi destana di desa Kepuhkiriman dapat ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Yang pertama dalam efektivitas pembentukan Destana sebagai wujud membangun ketangguhan masyarakat desa merupakan suatu hal yang sangat efektif, namun perlu keberlanjutan program Destana ini agar semakin ditingkatkan agar segala aspek bisa bekerja dengan baik. Lalu untuk efisiensi dirasa sudah efisien, hal ini mengingat pembentukan Destana menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai bentuk menjalankan sebuah kebijakan yang dapat dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat. Dalam aspek kecukupan di destana kepuhkirman ada beberapa yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah keberadaan logistic dan peralatan pengurangan risiko bencana, maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu di bidang penanggulangan bencana masih dianggap belum mencukupi. Sedangkan aspek

sumberdaya manusia secara kuantitas sudah dirasa mencukupi, hanya saja masih belum diketahui apakah di dalam kuantitas tersebut, terdapat kualitas relawan yang berkompeten dalam kegiatan penanggulangan bencana. Secara aspek perataan, perekrutan anggota relawan yang dibagi berdasarkan perwakilan RW menurut peneliti sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa desa Kepuhkiriman memiliki rasa kebersamaan dalam menjaga desa salah satunya tentang kegiatan penanggulangan bencana. Secara aspek perataan, perekrutan anggota relawan yang dibagi berdasarkan perwakilan RW menurut peneliti sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa desa Kepuhkiriman memiliki rasa kebersamaan dalam menjaga desa salah satunya tentang kegiatan penanggulangan bencana. Selanjutnya pada aspek responsivitas yang dilakukan oleh masyarakat desa Kepuhkiriman dalam menyadari potensi bencana di desa yang kemudian membentuk Destana sudah cukup baik dengan melibatkan warga masyarakat desa Kepuhkiriman. Namun respon dalam menindaklanjuti rencana penyusunan program kedepan dirasa sangat lambat. Tidak adanya bencana yang menjadi alasan tidak adanya kegiatan pengurangan risiko bencana

sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan.

- c. Adapun ditemukannya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana seperti masih adanya mindset dan tingkat kesadaran yang masih kurang. Masyarakat masih memiliki pandangan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana hanya pada saat ada bencana saja (tanggap darurat). Sehingga masyarakat belum mendapatkan edukasi tentang pengurangan risiko bencana secara maksimal. Belum adanya perkembangan pasca pembentukan desa tangguh bencana yang dikarnakan minim koordinasi dan komunikasi antara relawan destana dan unsur terkait tentang perencanaan program destana seperti pelatihan dan simulasi pengurangan risiko bencana. Sedangkan upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Sidoarjo masih dalam sebatas menjalin koordinasi yang formal kepada destana desa Kepuhkiriman.
- d. Keterbatasan Penelitian, dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan penelitian dalam hal mengamati fakta lapangan yang begitu minim. Salah satu faktornya adalah peneliti tidak memiliki cukup data dikarenakan kurangnya kegiatan lapangan yang dilakukan oleh destana Kepuhkiriman. Selain itu peneliti masih kesulitan dalam mencari data kebutuhan

administrasi yang dimiliki oleh destana Kepuhkiriman. Sehingga data yang berhasil dikumpulkan dan disajikan pada penelitian ini bersifat obvservatif atau pengamatan lapangan dengan menggali informasi melalui informan kunci.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, Wignyo. Manajemen bencana: Pengantar dan isu-isu strategis. Bumi Aksara, 2018.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2007. Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia. November. BNPB. Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2014. Merintis Jalan Menuju Indonesia Tangguh. BNPB. Jakarta.
- Direktur Tanggap Darurat. 2013. "Penanganan Pengungsi Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Dan Transisi Darurat Ke Pemulihan". Jakarta. BNPB. Vol 4-8.
- Fajarwati, Arnia, and Ulda Rahmadilla. "Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle." Dialog 7.1 (2022): 123-133.
- Ferreira, J. J., et al. "Multiple Helix Ecosystems for Sustainable Competitiveness." Switzerland: Springer International Publishing (2016).

- Hajaroh, Mami. "Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)." Foundasia 9.1 (2018).
- Keputusan Kepala Desa Kepuhkiriman Nomor 188 Tahun 2021 Tentang "Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tingkat Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo"
- Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo Nomor 360 Tentang "Penetapan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Kabupaten Sidoarjo" Tahun 2017
- Khoirul, Ahmadi. Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (Destana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (Perspektif Pengembangan Masyarakat). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021
- Maarif, Syamsul. 2015, Sosiologi Bencana : Sebuah Bahasan Paradigmatik. Pidato Pengukuhan Profesor, UNEJ – Jember
- Marta Peris-Ortiz Luís Farinha João J. Ferreira. Multiple Helix Ecosystems for Sustainable Competitiveness. Innovation, Technology, and Knowledge Management
- Muchsin, H. Slamet. Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana. UNISMA PRESS, 2017.
- Nick Carter. 2008. "Disaster Management". Journal Of Disaster Management Perspective. Chapter 3- 31.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pembentukan Satlak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 28 Februari 2008.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Rachim, A., Warella, Y., Astuti, R. S., & Suharyanto, S. (2020). Hexa helix: stakeholder model in the

management of Floodplain of
Lake Tempe. Prizren Social
Science Journal, 4(1), 20-27.

Retno Sunu Astuti. Hardi Warsono.
Abd. Rachim. Collaborative
Governance Dalam Perspektif
Administrasi Publik. Program
Studi Doktor Administrasi
Publik Universitas Diponegoro
Press. 2020.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan
R&D. Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007

Penanggulangan Bencana. 26 April
2007. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 66. Jakarta.

Wardhono, Hendro (2008).
Pengurangan Risiko Bencana
(PRB) : Telaah Teoritik –
Universitas Dr Soetomo.

Wibisono, P. Evaluasi Program Desa
Tangguh Bencana (Destana) di
Desa Tanjung Benoa,
Kabupaten Badung Bali Guna
Mendukung Keamanan
Nasional. Universitas
Pertahanan. 2019.

William, Dunn N. "Pengantar Analisis
Kebijakan Publik, Edisi
Kedua." (2003).

Witaradya, Kertya. "Implementasi
Kebijakan Publik Model Van
Meter Van Horn: The Policy
Implementation Process."
(2021).